



Amerika Serikat sebagai Negara Adidaya

Feni Sukma Dana , Adzkiyak

Pendidikan Sejarah, Universitas PGRI Argopuro Jember

Korespondensi penulis : Fenisukma2477@gmail.com, Adzkiyak73@gmail.com

Abstrak Pada kali ini mengulas tentang Amerika Serikat sebagai Negara Adidaya yang memiliki dampak signifikan dalam berbagai aspek seperti ekonomi, pertahanan, politik, teknologi, dan juga budaya di tingkat global. Melalui penelusuran sejarah dari masa penjajahan hingga mencapai status sebagai negara superpower, tulisan ini menguraikan faktor-faktor penting yang mendasari kekuatan Amerika Serikat, termasuk menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia, memiliki anggaran militer yang paling besar, inovasi teknologi, serta dominasi budaya populer di seluruh dunia. Di samping itu, makalah ini juga mengulas peran strategis Amerika Serikat dalam berbagai peristiwa global seperti Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin, serta pengaruh politiknya di organisasi internasional seperti PBB. Makalah ini menganalisis dampak positif dan negatif dari dominasi AS serta tantangan yang dihadapinya dalam mempertahankan posisinya sebagai negara adidaya di era globalisasi saat ini. Dengan pendekatan historis dan analitis, diharapkan tulisan ini dapat memberikan wawasan mendalam mengenai posisi dan fungsi Amerika Serikat di kancah internasional.

Kata Kunci: pendidikan ekonomi, integrasi ilmu, karakter budaya, teknologi

PENDAHULUAN

Amerika Serikat adalah negara di Amerika Utara yang berbatasan darat dengan Kanada dan Meksiko. Negara ini memiliki populasi sekitar 328 juta jiwa dan PDB mencapai 22.321 triliun dolar AS. Di bidang pertahanan, Amerika Serikat dianggap sebagai negara adidaya berkat pengaruhnya yang kuat secara politik, ekonomi, dan militer. Status adidaya Amerika Serikat muncul setelah Perang Dunia II, di mana kekuatan militer dan ekonominya mendominasi sementara negara-negara seperti Inggris dan Prancis melemah akibat perang. Sebagai negara adidaya, Amerika Serikat bertanggung jawab atas pembangunan global melalui berbagai lembaga bantuan, seperti United States Agency for International Development, Peace Corps, dan Millennium Challenge Corporation (Lawson & Morgenstern, 2019). Pada 2004, Amerika meluncurkan Millennium Challenge Corporation (MCC) sebagai bentuk bantuan luar negeri baru (Applegarth, 2019).

MCC adalah program bantuan ekonomi AS untuk negara berkembang, dengan tujuan mempromosikan pemerintahan yang adil, berorientasi rakyat, dan kebebasan ekonomi. Pemilihan penerima bantuan didasarkan pada kriteria khusus, seperti komitmen terhadap demokrasi dan kebebasan ekonomi di negara-negara berkembang. Hingga 2019, MCC telah menandatangani perjanjian dengan 29 negara (Applegarth, 2019). Penerima bantuan biasanya adalah negara berpendapatan menengah ke bawah dengan tata kelola baik, yang fokus mengurangi kemiskinan lewat pertumbuhan ekonomi. Dasar MCC adalah keyakinan AS bahwa kemajuan ekonomi berhasil jika didukung pasar bebas dan prinsip demokrasi, sehingga penerima wajib mengadopsi nilai-nilai tersebut.

Bantuan MCC diberikan secara komprehensif tanpa batasan wilayah, selama negara memenuhi kriteria. Mongolia termasuk salah satu penerima. Mongolia memulai reformasi demokrasi pada 1990 (Dumbaugh & Morrison, 2009). Sebelumnya, di bawah pengaruh Uni Soviet, kekuasaan dipegang Mongolian People's Revolutionary Party (MPRP). Mulai 1991, Mongolia mengadopsi sistem demokrasi, meski pemerintahan dan ekonominya masih tidak stabil. Padahal, negara ini kaya akan mineral dan logam, sehingga potensi ekonominya besar. Hal ini menunjukkan Mongolia masih relatif baru dalam menerapkan politik demokrasi.

Hubungan AS-Mongolia telah dimulai sejak 1987 di bidang ekonomi dan budaya (Dumbaugh & Morrison, 2009). Pada 1991, atas permintaan Mongolia, AS menempatkan personel keamanan di sana. Jumlah personel meningkat menjadi 100 orang pada 2007. Tahun 2008, Mongolia menandatangani perjanjian MCC yang menargetkan pengembangan transportasi, hak properti, pendidikan, dan kesehatan (Applegarth, 2019). Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis historis dan deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji proses historis serta faktor-faktor utama yang membentuk posisi Amerika Serikat sebagai negara adidaya

dalam sistem politik global. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah sumber-sumber relevan, baik sumber primer maupun sekunder. Sumber primer meliputi dokumen kebijakan luar negeri, pidato resmi presiden Amerika Serikat, serta arsip dan laporan lembaga internasional. Sementara itu, sumber sekunder terdiri atas buku ilmiah, artikel jurnal bereputasi, dan publikasi akademik yang membahas kekuatan ekonomi, militer, politik, dan budaya Amerika Serikat.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan mengklasifikasikan data berdasarkan dimensi kekuatan Amerika Serikat, yaitu ekonomi, militer, politik, dan pengaruh global. Selanjutnya, data dianalisis untuk mengidentifikasi keterkaitan antar faktor serta dinamika historis yang mendukung dominasi Amerika Serikat di tingkat internasional. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan berbagai referensi dan perspektif akademik guna memperoleh hasil penelitian yang objektif dan komprehensif.

LANDASAN TEORETIS

1. Definisi dan Konsep Teoritis Negara Adidaya

Teoritis, negara adidaya didefinisikan sebagai negara yang memiliki kekuatan yang melampaui negara-negara lain dan mampu mempengaruhi peristiwa global tanpa bergantung pada dukungan sekutu yang ekstensif. Beberapa teori kunci yang membentuk definisi ini adalah:

- Teori Kekuatan Relatif (Relative Power): Diusulkan oleh realis hubungan internasional, teori ini menekankan bahwa kekuatan negara diukur berdasarkan perbandingan dengan negara lain. AS memenuhi kriteria ini karena memiliki gap kekuatan yang signifikan dibandingkan negara-negara besar lainnya di bidang militer, ekonomi, dan teknologi.
- Teori Kekuatan Lunak dan Keras (Hard and Soft Power): Diumumkan oleh Joseph Nye, teori ini membedakan antara kekuatan keras (militer, ekonomi) dan kekuatan lunak (budaya, nilai-nilai, kepercayaan). AS menggabungkan kedua jenis kekuatan ini: kekuatan keras untuk menegakkan kehendak, dan kekuatan lunak untuk menarik negara lain secara tidak paksa.

- Teori Tatanan Global (Global Order): Teori ini melihat negara adidaya sebagai aktor yang membentuk aturan, institusi, dan norma tatanan global. AS berperan penting dalam mendirikan lembaga seperti PBB, Bank Dunia, dan NATO, yang menjadi landasan tatanan internasional pasca-Perang Dunia II.

2.Penerapan Teori pada Kasus Amerika Serikat

A. Kekuatan Keras AS

- Militer: AS memiliki angkatan bersenjata terbesar dan paling canggih di dunia, dengan pengeluaran militer yang melebihi jumlah 10 negara terbesar berikutnya. Kemampuan tempur jarak jauh, senjata nuklir, dan teknologi pertahanan canggih menjadikannya dominan di ranah keamanan global.

- Ekonomi: Sebagai ekonomi terbesar di dunia dengan PDB sekitar 25% dari total global, AS menguasai pasar keuangan, perdagangan, dan inovasi. Dolar AS sebagai mata uang resminternasional dan keberadaan perusahaan multinasional AS yang besar memperkuat posisinya.

B. Kekuatan Lunak AS

- Budaya dan Media: Hiburan AS (Hollywood, musik, olahraga) menyebar ke seluruh dunia, menciptakan "kultur global" yang dipengaruhi oleh nilai-nilai AS. Media massa seperti CNN dan sosial media asal AS juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik global.

- Nilai-nilai dan Institusi: Nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan pasar bebas yang dipromosikan AS telah menjadi referensi bagi banyak negara. Lembaga internasional yang didirikan atau didukung AS juga berperan dalam menyebarkan norma-norma ini.

D. Pembentukan Tatanan Global

AS berperan aktif dalam membentuk aturan tatanan global pasca-Perang Dunia II, seperti prinsip-prinsip PBB tentang perdamaian dan keamanan, serta sistem perdagangan bebas melalui GATT/WTO. Meskipun tatanan ini telah mengalami

perubahan, posisi AS sebagai aktor kunci dalam memelihara dan mengubahnya tetap terjaga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil kajian menunjukkan bahwa posisi Amerika Serikat sebagai negara adidaya terbentuk melalui akumulasi kekuatan politik, militer, ekonomi, dan budaya yang terintegrasi dalam sistem global. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat berhasil memanfaatkan momentum sejarah untuk memperluas pengaruhnya dalam tatanan internasional.

Secara politik, Amerika Serikat memainkan peran sentral dalam pembentukan dan pengendalian institusi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia. Keterlibatan aktif dalam lembaga-lembaga tersebut memperkuat legitimasi kepemimpinan global Amerika Serikat serta memungkinkan negara ini memengaruhi kebijakan internasional, khususnya dalam isu keamanan dan ekonomi global. Dari aspek militer, hasil penelitian menunjukkan bahwa keunggulan Amerika Serikat terletak pada modernisasi teknologi persenjataan, besarnya anggaran pertahanan, serta keberadaan pangkalan militer di berbagai kawasan strategis dunia. Kondisi ini menjadikan Amerika Serikat sebagai aktor utama dalam menjaga sekaligus mengintervensi stabilitas keamanan internasional, baik melalui operasi militer langsung maupun aliansi pertahanan.

Dalam bidang ekonomi, dominasi Amerika Serikat tercermin melalui peran dolar sebagai mata uang cadangan dunia dan pengaruh perusahaan multinasional Amerika dalam perdagangan global. Kebijakan ekonomi Amerika Serikat terbukti memiliki dampak sistemik terhadap perekonomian global, termasuk negara-negara berkembang yang bergantung pada arus investasi dan perdagangan internasional. Selain itu, hegemoni Amerika Serikat juga terlihat dalam ranah budaya dan teknologi. Penyebaran budaya populer serta dominasi perusahaan teknologi berbasis Amerika memperkuat pengaruh ideologis dan nilai-nilai liberal di tingkat global. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan adidaya tidak hanya bersifat material, tetapi juga simbolik dan kultural.

Namun demikian, hasil analisis juga mengungkap adanya dampak ambivalen dari dominasi Amerika Serikat. Di satu sisi, peran Amerika Serikat berkontribusi terhadap stabilitas internasional dan kemajuan teknologi. Di sisi lain, dominasi tersebut memunculkan resistensi global, konflik geopolitik, serta kritik terhadap praktik intervensi dan ketimpangan kekuasaan internasional. Dengan demikian, Amerika Serikat sebagai negara adidaya berperan signifikan dalam membentuk dinamika politik, ekonomi, dan budaya dunia. Posisi ini menegaskan bahwa kekuatan global bersifat multidimensional dan memiliki konsekuensi jangka panjang bagi tatanan internasional.

Pembahasan

1898: Lahirnya sebuah Negara Adidaya

Keseimbangan dunia yang selama ini memungkinkan Amerika Serikat berkembang dan sejahtera dalam isolasi relatif sejak 1815, lenyap selamanya akibat perang singkat tapi dahsyat. Pada 1898, dukungan rakyat AS terhadap kemerdekaan Kuba menyeret negara itu ke dalam konflik kekuasaan dengan Spanyol mengenai masa depan pulau tersebut. Keputusan untuk mendukung pemberontak Kuba ini merupakan penyimpangan mencolok dari tradisi nasionalisme liberal Amerika, dan dampaknya terasa luas.

Perjanjian Paris 1898 yang mengakhiri perang memberikan kemerdekaan pada Kuba serta menyerahkan wilayah-wilayah krusial Spanyol ke tangan Amerika Serikat khususnya Puerto Riko, Filipina, dan Guam yang kecil. Tiba-tiba, AS berubah menjadi kekuatan kolonial dengan jajahan di luar negeri. Tanggung jawab kolonial ini bukan sekadar euforia sesaat tahun 1898, melainkan penanda pergeseran mendasar dalam diplomasi Amerika.

Kebijakan luar negeri abad ke-19 mulai usang di awal abad ke-20 karena perubahan negara itu sendiri. AS kini punya hampir semua ciri negara adidaya unggul atau nyaris unggul atas negara lain dalam populasi, luas wilayah dan posisi strategis di dua samudra, kekayaan ekonomi, serta potensi militer. Kebijakan luar negeri pun harus menyesuaikan dengan realitas baru. Presiden William McKinley menyoroti kondisi ini dalam arahan kepada delegasi AS yang bernegosiasi Perjanjian Paris: “Kita tak boleh

melupakan bahwa, tanpa niat atau rencana dari kami, perang telah menimpakan tugas dan kewajiban baru yang harus kita emban dan laksanakan layaknya bangsa besar, yang pertumbuhan dan kemajuannya sejak dulu telah ditakdirkan oleh Penguasa Bangsa-Bangsa sebagai mandat dan janji peradaban tingkat tinggi.

” Pengamat saat itu, George L. Rives, memperluas pandangan ini. “Suka atau tidak,” katanya, “jelas bahwa negara ini kini memasuki fase sejarah di mana ia tak terelakkan terlibat dalam hubungan yang lebih erat dan rumit dengan semua kekuatan besar dunia lainnya” yaitu sebuah situasi yang membuat kebijakan luar negeri lama jadi ketinggalan zaman. “Kita kini dan selamanya dipandang sebagai pihak yang telah meninggalkan isolasi tradisional kami.”

1. Menduduki tanah pribumi

Awal kenapa Amerika disebut negara adidaya bermula dari penjelajah dan pemukim Eropa tiba di Amerika Utara dan menduduki tanah pribumi. Pada 1795, AS dan Spanyol menandatangani Perjanjian San Lorenzo lalu membagi-bagi sebagian besar wilayah Amerika Utara untuk mereka berdua. Selama satu abad berikutnya, penduduk pribumi semakin terpinggirkan karena tanah mereka diambil sepotong demi sepotong. Hingga akhirnya, Undang-Undang Dawes pada 1887 secara efektif menghapus Pemerintahan yang berdiri sendiri dari masyarakat lokal dan penerapan asimilasi, membuat hanya segelintir penduduk asli Amerika yang tinggal.

2. Mengambil tanah Meksiko

Setelah Meksiko merdeka pada tahun 1821, Amerika Serikat tetap menjadi kekuatan besar. Meksiko memperoleh wilayah yang sebelumnya dikuasai Spanyol, tetapi mayoritas wilayah itu tidak terkontrol. Daerah tersebut kini menjadi bagian dari negara bagian Texas hingga bagian utara California. Penduduk Amerika semakin banyak tinggal di wilayah itu, dan pada tahun 1829 jumlah mereka melebihi penduduk asli yang berbahasa Spanyol di Texas yang saat itu masih merupakan bagian dari Meksiko. Pemberontakan kecil oleh penduduk Amerika terjadi pada tahun 1835, yang akhirnya memicu perang kemerdekaan. Penduduk Amerika memenangkan perang tersebut dan mendirikan Republik Texas, yang kemudian menggabungkan diri dengan Amerika

Serikat pada tahun 1845. Wilayah Amerika semakin luas setelah Presiden ke-11 Amerika Serikat, James K. Polk, ingin memperluas wilayah barat untuk memperluas perbudakan. Perang kembali pecah pada tahun 1846, untuk memperebutkan wilayah Texas yang batasnya bersengketa dengan Meksiko, dan perang tersebut cepat meluas ke sebagian besar wilayah Meksiko. Amerika Serikat menang dan merebut sebagian besar wilayah Meksiko, yang kini menjadi bagian dari California, Utah, Nevada, Arizona, New Mexico, dan Texas.

3 Menggantikan Kekaisaran Spanyol sebagai kekuatan global

Ketika Kekaisaran Spanyol jatuh, terjadi perdebatan panas di Amerika Serikat mengenai siapa yang seharusnya mengisi kekosongan sebagai kekuatan dunia. Pertikaian ini kemudian berpusat di Kuba. Kaum pro-imperialis ingin membeli atau mencaploknya dari Spanyol, tetapi kubu anti-imperialis mendukung kemerdekaan Kuba. Sebelum 1861, Kuba rencananya dijadikan negara budak baru. Tahun 1898 aktivis Kuba melancarkan perang kemerdekaan dari Spanyol, dan AS campur tangan membantu Kuba. Spanyol pun kalah. Kubu anti-imperialis mencegah AS mencaplok Kuba, tetapi kaum pro-imperialis berhasil menemukannya di bawah pengaruh kuasi-imperialis. Pangkalan AS di Guantanamo adalah peninggalan dari masa tersebut. AS juga mengambil tiga kepemilikan Spanyol lainnya yaitu Puerto Rico, Guam, dan Filipina yang waktu itu adalah negara kepulauan besar dan terpadat di Pasifik.

4. Merebut Hawaii, awal ekspansi ke Pasifik

Sejarah penyebutan Amerika sebagai negara adidaya berlanjut dengan perluasan di wilayah Pasifik. Pebisnis Amerika mengambil alih Hawaii pada tahun 1893 dan meminta kepada AS untuk mengintegrasikannya. Presiden AS Grover Cleveland menolak permintaan tersebut, namun saat William McKinley menjabat sebagai presiden, ia setuju untuk mengintegrasikan Hawaii, menjadikannya sebagai akuisisi pertama dari sejumlah wilayah di Pasifik.

5. Amerika tetap perkasa setelah Perang Dunia I

Perang Dunia I menjadi arena pertempuran enam negara besar yaitu Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Austria, Rusia, dan Prancis. Namun, kerusakan akibat perang

serta utang yang mengakibatkan masalah besar membuat Jerman, Austria, Rusia, dan Prancis menderita. Hanya Amerika Serikat dan Inggris yang tetap kuat.

6. Eropa dan Asia hancur di Perang Dunia II,

Perang Dunia Kedua menghancurkan dua kekuatan utama yang tergabung dalam blok Poros, yaitu Jerman dan Jepang. Uni Soviet, Tiongkok, serta negara-negara di Eropa Timur dan Asia Timur juga mengalami kerusakan yang parah akibat Perang Dunia Kedua.

7. Jatuhnya kolonialisme Eropa Dampak dari Perang Dunia II

Adalah runtuhnya kolonialisme Eropa, yang juga menjelaskan mengapa Amerika dikenal sebagai negara superpower. Gerakan untuk meraih kemerdekaan muncul di wilayah Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Ekonomi Eropa mengalami kemunduran, dan terjadi konflik besar setelah perang, seperti Krisis Suex di tahun 1956. Struktur dunia mengalami perubahan dan tidak lagi menganut kolonialisme. Pada waktu itu, hanya ada dua negara besar yang masih ada, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet.

8. Perang Dingin yang membagi dunia menjadi dua kubu

Setelah periode kolonial berakhir, Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat dalam konflik yang dikenal sebagai Perang Dingin. Kedua negara ini bersaing dalam hal ideologi dan kepentingan di Eropa dan Asia, didorong oleh rasa curiga yang sangat besar terhadap satu sama lain. Amerika Serikat dan Uni Soviet juga bersaing dalam pengembangan senjata nuklir serta membangun aliansi, tetapi bukan untuk berperang, melainkan untuk mendapatkan pengaruh global. Kedua negara itu kemudian berperan besar dalam kudeta, pemberontakan, mendukung para pemimpin otoriter, dan terlibat dalam perang proksi di hampir seluruh penjuru dunia. Perang Dingin berakhir seiring runtuhnya Uni Soviet pada tanggal 25 Desember 1991. Dengan demikian, Amerika Serikat muncul sebagai negara dengan kekuatan militer dan diplomasi yang tak tertandingi di skala dunia.

9. Berdirinya NATO dan ekspansi yang terus berlanjut

Organisasi Perjanjian Atlantik Utara atau NATO didirikan pada awal periode Perang Dingin pada 4 April 1949 oleh 12 negara dengan tujuan melindungi Eropa Barat

dari potensi serangan Soviet, di mana keanggotaannya terus bertambah seiring berjalannya waktu. Negara-negara yang menjadi pendiri NATO mencakup Belgia, Inggris, Kanada, Denmark, Perancis, Islandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, dan Amerika Serikat. Saat Perang Dingin berlangsung, NATO mengembangkan anggotanya hingga hampir seluruh negara Eropa bagian barat yang berada di luar blok Soviet. Anggota NATO sepakat untuk saling bantu jika salah satu dari mereka diserang, layaknya memperjuangkan tanah air mereka sendiri. Amerika Serikat merupakan anggota NATO yang paling berpengaruh dan menjadi pemimpin dalam aliansi ini. Banyak negara di Eropa kemudian menggantungkan pertahanan mereka pada kekuatan Amerika. Bahkan, Korea Selatan dan Jepang juga memperkuat hubungan militer dengan AS melalui kesepakatan keamanan dan keberadaan pangkalan militer.

10. Kekuatan militer terbesar

Salah satu alasan utama mengapa Amerika dianggap sebagai negara superpower adalah karena kekuatan di bidang militernya. Berdasarkan informasi dari SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) pada tahun 2020, anggaran militer Amerika mencapai 778 miliar dolar AS (setara dengan Rp 11,64 kuadriliun), yang jumlahnya lebih tinggi dibandingkan keseluruhan anggaran dari China, India, Rusia, Inggris, Arab Saudi, Jerman, Perancis, Jepang, dan Korea Selatan yang berada di urutan 10 besar. Jika total pengeluaran militer dari sepuluh negara tersebut digabungkan, angkanya adalah 703,6 miliar dolar AS (Rp 10,52 kuadriliun).

11. Inovasi teknologi Selain kekuatan militer, I

Uas wilayah, dan aliansi, AS juga unggul dalam inovasi teknologi dan penelitian ilmiah. Sejak awal 1901 hingga 2021 AS telah memenangi 400 Hadiah Nobel dan sebagian besar di bidang sains. Itu bisa terjadi karena banyak faktor seperti kekayaan, budaya dan perekonomian yang memfasilitasi inovasi, sistem pendidikan, program riset skala besar yang didukung oleh pemerintah dan sektor swasta, serta daya tarik bagi imigran terdidik untuk datang. Semua elemen ini saling berhubungan dan berperan dalam menjelaskan mengapa Amerika dianggap sebagai negara superpower.

KESIMPULAN

Amerika Serikat berhasil mempertahankan posisinya sebagai negara adidaya melalui kombinasi kekuatan politik, militer, ekonomi, dan budaya yang saling terkait. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat memainkan peran sentral dalam membentuk tatanan dunia internasional, khususnya melalui pengaruhnya dalam lembaga-lembaga internasional dan sistem ekonomi global. Dominasi Amerika Serikat tidak hanya tercermin dalam keunggulan militer dan ekonomi, tetapi juga dalam kemampuan menyebarkan nilai, ideologi, dan budaya melalui konsep soft power. Hal ini memperkuat legitimasi kepemimpinan global Amerika Serikat sekaligus memperluas jangkauan pengaruhnya di berbagai kawasan dunia.

Namun demikian, posisi Amerika Serikat sebagai negara adidaya juga menimbulkan dinamika global yang kompleks. Di satu sisi, perannya berkontribusi terhadap stabilitas internasional dan perkembangan global. Di sisi lain, dominasi tersebut memicu ketimpangan kekuasaan, konflik geopolitik, serta kritik terhadap praktik hegemoni dan intervensi internasional. Dengan demikian, Amerika Serikat sebagai negara adidaya memiliki peran strategis dalam menentukan arah hubungan internasional. Pemahaman terhadap peran ini menjadi penting untuk menganalisis perubahan tatanan global dan tantangan dunia internasional di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Brown, R. T. (2018). The impact of social media on youth behavior. *Journal of Social Psychology*, 45(2), 112-125.
- Friedman, G. (2009). *The next 100 years: A forecast for the 21st century*. Doubleday.
- Hobsbawm, E. (1995). *Age of extremes: The short twentieth century, 1914–1991*. Michael Joseph.
- Ikenberry, G. J. (2011). *Liberal leviathan: The origins, crisis, and transformation of the American world order*. Princeton University Press.
- Kennedy, P. (1987). *The rise and fall of the great powers*. Random House.

- Kennedy, P. (1987). *The rise and fall of the great powers: Economic change and military conflict from 1500 to 2000*. Random House.
- Kissinger, H. (2014). *World order*. Penguin Press.
- McCormick, T. J. (2009). *America's half-century: United States foreign policy in the Cold War*. Johns Hopkins University Press.
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. PublicAffairs.
- Nye, J. S. (2011). *The future of power*. PublicAffairs.
- Smith, T. (2000). America's mission: The United States and the worldwide struggle for democracy. *Politics & Society*, 28(3), 333-356.
<https://doi.org/10.1177/0032329200028003003>
- U.S. Department of State. (2021). *U.S. foreign policy overview*.
<https://www.state.gov/foreign-policy-overview/>
- Williams, S. L. (2021, March 12). *The role of technology in modern education*. Tech Times. <https://www.techtimes.com>
- Zakaria, F. (2008). *The post-American world*. W. W. Norton & Company.